



## **Pengelolaan Ekowisata Mangrove Lantebung, Makassar: Perspektif Pengelola dan Masyarakat Lokal**

**Agus Salim Syam<sup>1\*</sup>, Ansar<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Indonesia Timur, Indonesia

### **Corresponding Author**

Email: [anchasumigo@gmail.com](mailto:anchasumigo@gmail.com)

### **Abstract**

*The Lantebung Mangrove Forest in Makassar has been designated as an ecotourism area, but its development is still hampered by limited facilities and infrastructure. This study aims to analyze the management of the Lantebung Mangrove Forest ecotourism area based on the perceptions of managers and the local community. The method used is qualitative descriptive through observation, interviews, literature study, and questionnaires with purposive sampling techniques on 30 respondents involving managers and local communities. Data analysis uses frequency tabulation to measure respondents' perceptions of four indicators: area planning, conservation, management, and facilities. The results showed that the majority of respondents (90%) considered the planning, conservation, and collaborative management of the mangrove area to be very important, accompanied by an urgent need for basic facilities such as toilets, bridges, and trash bins. This reflects a high level of collective awareness of the importance of sustainable management, even though implementation is still constrained by infrastructure limitations.*

**Keywords:** Lantebung, Mangrove Ecotourism, Collaborative Management, Community Perceptions, Makassar.

### **Abstrak**

Hutan Mangrove Lantebung, Makassar telah ditetapkan sebagai kawasan ekowisata, namun pengembangannya masih terkendala oleh sarana dan prasarana yang terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis penataan kawasan ekowisata Hutan Mangrove Lantebung berdasarkan persepsi pengelola dan masyarakat setempat. Metode yang digunakan adalah [SE1.1][T1.2]deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, studi pustaka, dan kuesioner dengan teknik purposive sampling terhadap 30 responden yang melibatkan pengelola dan masyarakat lokal. Analisis data menggunakan tabulasi frekuensi untuk mengukur persepsi responden terhadap empat indikator: penataan kawasan, pelestarian, pengelolaan, dan fasilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden (90%) menilai penataan, pelestarian, dan pengelolaan kolaboratif kawasan mangrove sangat penting, disertai kebutuhan mendesak terhadap fasilitas dasar seperti toilet, jembatan, dan tempat sampah. Hal ini mencerminkan tingginya kesadaran kolektif akan pentingnya pengelolaan berkelanjutan, meski implementasi masih terkendala keterbatasan infrastruktur.

**Kata Kunci:** Lantebung, Ekowisata Mangrove, Pengelolaan Kolaboratif, Persepsi Masyarakat, Makassar.

## **PENDAHULUAN**

Pariwisata merupakan sektor strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia, salah satunya melalui pengembangan ekowisata yang berprinsip pada keberlanjutan. Ekowisata tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menjamin kelestarian lingkungan dan sosial-budaya masyarakat setempat. Fandeli (2020), menegaskan bahwa ekowisata yang berkelanjutan harus didasarkan pada partisipasi aktif masyarakat lokal sebagai pelaku utama, sehingga mereka tidak diposisikan sekadar objek, melainkan subjek yang mengelola dan memperoleh manfaat langsung. Bentuk partisipasi ini terbukti dapat meningkatkan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial-ekonomi, serta menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap kawasan ekowisata (Aisah & Wahyuni, 2020).

Hutan mangrove merupakan salah satu ekosistem pesisir dengan fungsi ekologis yang penting, antara lain melindungi pantai dari abrasi, menyediakan habitat bagi biota laut, dan berperan sebagai penyerap karbon dalam jumlah besar (Wulandari dkk., 2025). Mangrove bersama lamun dikenal sebagai “penyerap karbon biru” yang efektif dalam mitigasi perubahan iklim global (Ghazi, 2022). Selain fungsi ekologis, ekosistem mangrove memiliki nilai ekonomi sebagai sumber mata pencaharian dan potensi rekreasi berbasis masyarakat (Setiawan & Budi, 2021; Utomo & Setyo, 2022).

Kawasan mangrove Lantebung merupakan sisa jalur hijau yang kini ditetapkan sebagai kawasan konservasi dan perlindungan ekosistem pesisir berupa kawasan mangrove (BPPD, 2015). Sejak tahun 2010 pemerintah Makassar dan masyarakat telah melakukan kegiatan penanaman mangrove di sepanjang pesisir Lantebung. Untuk mendukung keberlanjutan konservasi mangrove di kawasan ini, pemerintah mencanangkan ekosistem mangrove Lantebung sebagai kawasan ekowisata. Kawasan Mangrove Lantebung terletak di Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi dan ekowisata dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar 2005-2025. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penataan kawasan hutan wisata mangrove di Lantebung dari perspektif pengelola dan masyarakat sekitar, yang menjadi kunci keberhasilan pengembangan ekowisata berkelanjutan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian adalah kawasan ekowisata mangrove Lantebung, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar yang telah dilaksanakan pada bulan April-Mei tahun 2022.

Populasi penelitian meliputi pengelola dan masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan wisata. Sampel ditentukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu kriteria pemilihan sampel adalah individu yang dianggap mengetahui dan terlibat langsung dengan kondisi kawasan ekowisata[SE1.1][T1.2]. Jumlah responden sebanyak 30 orang, terdiri dari 5 pengelola dan 25 masyarakat lokal. Teknik pengumpulan data meliputi: [

1. Data kualitatif (Observasi: Pengamatan langsung terhadap kondisi fisik dan fasilitas di lokasi penelitian, Wawancara: Wawancara mendalam dengan responden untuk memperoleh data kualitatif, dan Studi Kepustakaan: Mengumpulkan data sekunder dari jurnal, buku, dan dokumen resmi terkait).
2. Data kuantitatif (Kuesioner: Menggunakan kuesioner tertutup dengan Skala Likert 4: Sangat Penting, 3: Penting, 2: Biasa-biasa, 1: Tidak Penting, untuk mengukur persepsi responden).

Analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif dengan menggunakan tabulasi frekuensi yang merupakan bahan dasar untuk analisis tabulasi silang. Pengukuran peran responden dalam pelestarian hutan mangrove ditelusuri dari tiga aspek, peran serta dalam perencanaan, peran serta dalam penyuluhan, dan peran serta dalam penghijauan dan pemeliharaan kawasan mangrove. Pengukuran dilakukan menggunakan sejumlah pertanyaan tertutup, yakni pertanyaan yang sudah disediakan alternatif jawabannya. Berdasarkan jawaban responden selanjutnya akan diperoleh kecenderungan atas

jawaban responden maka perhitungan indeks jawaban responden kemudian diolah menggunakan microsoft excel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Karakteristik Responden

Dari 30 responden yang diteliti, mayoritas berjenis kelamin laki-laki yaitu 28 orang (93%). Kelompok umur terbanyak berada pada rentang usia 40-50 tahun sebanyak 11 orang (37%).. Dari sisi pendidikan, responden didominasi oleh lulusan SD (47%), diikuti oleh SMA (33%). Pekerjaan utama responden adalah nelayan (67%), yang menunjukkan ketergantungan masyarakat lokal terhadap ekosistem pesisir, khususnya hutan mangrove di kaasan ekowisata Lantebung

Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

No	Umur	Frekuensi	Persentase
1	20-30	10	33
2	30-40	4	13
3	40-50	11	37
4	50-60	5	17
<b>Total</b>		<b>30</b>	<b>100</b>

Tabel 2. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki – Laki	28	93
2	Perempuan	2	7
<b>Total</b>		<b>30</b>	<b>100</b>

Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase
1	SD	14	47
2	SMP	4	13
3	SMA	10	33
4	SMK	2	7
<b>Total</b>		<b>30</b>	<b>100</b>

Tabel 4. Karakteristik Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
1	Nelayan	20	67
2	Karyawan Swasta	3	10
3	Wiraswasta	3	10
4	Tukang Perahu	1	3
5	Ibu Rumah Tangga	2	7
6	Pensiunan PNS	1	3
<b>Total</b>		<b>30</b>	<b>100</b>

## Persepsi Responden terhadap Pengelolaan Kawasan Ekowisata Mangrove Lantebung

### 1. Persepsi Terhadap Penataan Kawasan

Sebanyak 90% responden menyatakan bahwa keberadaan kawasan hutan wisata mangrove Lantebung sangat penting bagi mereka, terutama dalam memberikan dampak ekonomi. Mayoritas juga menilai bahwa penetapan batas kawasan secara jelas merupakan hal penting untuk mendukung pengelolaan yang lebih baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan Wiwik & Yetti (2021) yang mengamati para Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) serta Fitriani (2020) di Pantai Indah Kapuk (PIK) yang menegaskan bahwa ekowisata mangrove berkontribusi pada peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat melalui partisipasi aktif. Dengan demikian, kesadaran masyarakat Lantebung terhadap manfaat ekonomi menegaskan urgensi penataan kawasan secara berkelanjutan.



Gambar 1. Kawasan Ekowisata Mangrove Lantebung

### 2. Persepsi Terhadap Pelestarian Kawasan

Tingkat kesadaran akan pentingnya pelestarian sangat tinggi. Sebanyak 67% responden menyatakan "Sangat Penting" untuk menjaga kawasan mangrove, dan 70% menyatakan "Sangat Penting" untuk melestarikannya. Responden memahami fungsi mangrove sebagai pelindung dari abrasi dan habitat biota laut, yang secara langsung berkaitan dengan mata pencaharian mereka sebagai nelayan. Ini sejalan dengan fungsi ekologis mangrove sebagai pelindung garis pantai dan *nursery ground*. Persepsi positif masyarakat terhadap pelestarian hutan mangrove memiliki korelasi kuat dengan keberhasilan program ekowisata. Keterlibatan aktif warga dalam menjaga kebersihan, penanaman kembali, dan edukasi pengunjung menjadi indikator utama (Utomo & Setyo, 2020; Setiawan & Budi, 2021). Dalam studi kami, masyarakat memandang konservasi mangrove bukan lagi sebagai beban, melainkan sebagai aset berharga yang memberikan nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kesadaran ini memicu inisiatif swadaya untuk rehabilitasi lahan, pengawasan aktivitas ilegal, dan pengembangan produk turunan mangrove yang ramah lingkungan, sehingga memberikan dampak positif terhadap pelestarian kawasan ekowisata Lantebung.

### 3. Persepsi Terhadap Pengelolaan Kawasan

Sebagian besar responden (90%) menilai kolaborasi pengelolaan antara masyarakat, pemerintah, dan swasta sangat penting, termasuk kontrol rutin oleh dinas terkait. Tingginya dukungan terhadap penanaman bibit mangrove (90%) menunjukkan adanya komitmen partisipatif

dari masyarakat untuk rehabilitasi. Keterlibatan aktif masyarakat merupakan pilar utama dalam pengelolaan ekowisata yang berkelanjutan. Hasil ini menguatkan pengembangan ekowisata kawasan hutan mangrove dan pengelolaan yang baik akan memberikan manfaat untuk masyarakat. Persepsi masyarakat Desa Wonorejo terhadap pengelolaan ekowisata mangrove secara umum sangat positif, terutama terkait dengan transparansi alokasi dana dan program pemberdayaan. Masyarakat merasa dilibatkan dalam pengambilan keputusan, mulai dari penentuan tarif masuk hingga pembagian tugas operasional. Partisipasi aktif ini menciptakan rasa kepemilikan yang kuat, yang pada akhirnya berdampak pada keberlanjutan dan kelancaran operasional ekowisata (Sari dkk, 2023; Dewi, dkk 2022). Dengan demikian, masyarakat Lantebung tidak hanya mendukung rehabilitasi mangrove, tetapi juga menuntut keterlibatan dalam pengambilan keputusan pengelolaan sebagai bentuk partisipatif aktif.

#### **4. Persepsi Terhadap Fasilitas Umum**

Sebagian besar responden menilai fasilitas dasar seperti kamar mandi (93%), jembatan (87%), dan tempat sampah (53%) masih sangat dibutuhkan. Hasil ini mengindikasikan bahwa infrastruktur dasar di kawasan ekowisata mangrove Lantebung masih sangat minim dan perlu menjadi prioritas pembangunan. Fasilitas yang memadai adalah syarat mutlak untuk meningkatkan daya tarik wisata dan kenyamanan pengunjung. Pengunjung cenderung merasa nyaman jika area ekowisata mangrove terjaga kebersihannya dan teratur. Key person menilai pengelolaan telah berjalan dengan baik, wisatawan menilai pengelolaan ekowisata buruk (80%). Seluruh wisatawan menilai bahwa sarana dan prasarana perlu adanya perbaikan di segala sektor (Wahid dkk, 2023; Prasetyo dkk, 2023). Kondisi di Lantebung menunjukkan kesenjangan antara tingginya kesadaran masyarakat dan lemahnya dukungan infrastruktur, sehingga perbaikan sarana-prasarana perlu diprioritaskan.

Kawasan Ekowisata Lantebung di Makassar menyimpan potensi besar sebagai destinasi ekowisata, didukung oleh kesadaran yang cukup tinggi akan pentingnya pelestarian alam dan pengembangan pariwisata berkelanjutan. Namun, paradoksnya, fasilitas di lokasi ini seringkali masih jauh dari optimal. Kesenjangan ini mengindikasikan adanya hambatan sistemik yang melibatkan tiga pilar utama: keterbatasan anggaran, kebijakan yang belum fokus, dan potensi konflik kepentingan.

Salah satu penghambat utama adalah keterbatasan anggaran. Meskipun kesadaran akan potensi ekowisata di Lantebung tinggi, alokasi dana seringkali menjadi tantangan. Pemerintah Kota Makassar menghadapi berbagai prioritas pembangunan lain, sehingga ekowisata mungkin tidak selalu menjadi prioritas utama. Ketergantungan pada dana pusat atau hibah juga seringkali terjadi, namun proses pencairan dana ini panjang dan tidak pasti. Selain itu, model pembiayaan ekowisata di Lantebung belum optimal; kurangnya diversifikasi pendapatan atau tarif masuk yang terlalu rendah membuat pengembangan dan pemeliharaan fasilitas sulit dibiayai secara mandiri.

Hambatan kedua adalah kebijakan yang belum fokus. Kesadaran tanpa kebijakan yang kuat dan terarah hanya akan menghasilkan pembangunan yang tambal sulam. Lantebung tidak memiliki Rencana Induk (*Master Plan*) yang komprehensif, jangka panjang, dan mengikat, sehingga arah pengembangan menjadi tidak jelas. Koordinasi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lemah juga menjadi masalah, menyebabkan kebijakan tidak sinkron dan upaya pengembangan terfragmentasi. Keterlibatan masyarakat lokal dalam perumusan kebijakan juga seringkali terbatas, padahal mereka adalah garda terdepan dalam menjaga kawasan. Selain itu, regulasi dan penegakan hukum yang kurang tegas mengenai pelestarian lingkungan dan pembangunan di kawasan ekowisata memungkinkan praktik yang merusak ekosistem. Pergantian kebijakan dan pimpinan daerah yang sering juga dapat menghentikan atau mengubah arah proyek pengembangan yang sudah berjalan, menghambat keberlanjutan.

Terakhir, dan seringkali yang paling merusak, adalah konflik kepentingan. Ada kemungkinan adanya tekanan dari pihak-pihak yang ingin mengembangkan Lantebung untuk tujuan non-ekowisata, seperti perumahan atau industri, yang bisa merusak karakteristik alamnya. Kepentingan bisnis tertentu juga dapat memengaruhi keputusan pengembangan fasilitas, mengarahkan proyek ke kontraktor atau pemasok yang menguntungkan mereka, bukan yang terbaik secara kualitas atau efisiensi. Potensi eksploitasi sumber daya alam seperti mangrove atau perikanan untuk keuntungan pribadi juga bisa mengabaikan prinsip keberlanjutan ekowisata. Konflik lahan dan hak ulayat juga seringkali menghambat investasi dan pengembangan fasilitas karena ketidakpastian hukum. Bahkan, terkadang proyek fasilitas dibangun untuk kepentingan politik, tanpa perencanaan matang untuk pemeliharaan jangka panjang.

Secara keseluruhan, kesenjangan antara kesadaran tinggi dan fasilitas yang buruk di Kawasan Ekowisata Lantebung adalah cerminan dari tantangan multidimensional. Mengatasinya memerlukan komitmen anggaran yang serius, perumusan kebijakan yang terintegrasi dan partisipatif, serta keberanian untuk mengatasi konflik kepentingan yang merusak. Tanpa alamat akar masalah ini secara komprehensif, Lantebung akan terus menjadi kawasan dengan potensi besar yang belum sepenuhnya terwujud, terjebak dalam kesenjangan antara harapan dan kenyataan.

## **KESIMPULAN**

Persepsi pengelola dan masyarakat lokal terhadap ekowisata mangrove Lantebung tergolong sangat positif, dengan kesadaran tinggi pada fungsi ekologis dan ekonomis. Model pengelolaan kolaboratif dinilai paling ideal, namun pengembangan masih terbatas oleh infrastruktur dan kapasitas SDM.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aisah, N, & Wahyuni, L. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Ekowisata Hutan Mangrove di Kampung Rawa Mekar Jaya. *Social Work Journal*, 1(2), 55-68.
- BPPD. (2015). *Laporan Kawasan Konservasi Pesisir Kota Makassar*. Makassar: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar.
- Dewi, & Ratna Sari. (2022). Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan dan Keberlanjutan Ekowisata Mangrove di Wonorejo. *Jurnal Pariwisata Indonesia*, 11(3), 112-125.
- Fandeli, C. (2020). *Pengembangan Ekowisata Berbasis Komunitas*. Jakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fitriani. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Ekowisata Hutan Mangrove Pantai Indah Kapuk untuk Peningkatan Ekonomi Lokal. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 12-23.
- Ghazi, F. (2022). *Pentingnya Lamun untuk Ekosistem Laut*. Elementa Agro Lestari.
- Prasetyo, B, Gunawan, H, & Wulandari, S. (2023). Analisis Kualitas Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata Terhadap Kepuasan Pengunjung. *Jurnal Pariwisata*, 15(2), 45-58.
- Sari, A, Nur, A, & Hidayat, K. (2023). Persepsi Masyarakat Terhadap Pemanfaatan dan Pengelolaan Hutan Mangrove di Kampung Kambala dan Yarona Distrik Buruway Kabupaten Kaimana. *Jurnal Hutan Tropis Papua, Igya ser hanjop*, 5(2), 87-101.
- Setiawan, & Budi. (2021). Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Konservasi Mangrove dan Dampaknya pada Pengembangan Ekowisata di Kulon Progo. *Jurnal Pariwisata Pesisir*, 9(2), 56-68.

- Utomo, & Setyo. (2022). Persepsi Masyarakat dan Peranannya dalam Keberlanjutan Ekowisata Hutan Mangrove di Desa Tanjung Rejo. *Jurnal Ilmiah Kehutanan*, 15(1), 22-35.
- Wahid, N, Setianto, A, & Lestari, R. (2023). Pengembangan Fasilitas Wisata Berbasis Konservasi di Kawasan Hutan Lindung. *Jurnal Manajemen Pariwisata*, 12(4), 112-125.
- Wulandari, S, Maryani, M, & Prastuti, I. (2025). Peran dan Manfaat Ekosistem Mangrove Terhadap Masyarakat Wilayah Pesisir Muara Sugihan. *Jurnal Abdi Insani*, 10(1), 200–210.